



GUBERNUR LAMPUNG
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/207/VI.07/HK/2023

TENTANG

**RENCANA AKSI DAERAH PENANGANAN KONFLIK SOSIAL PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2023**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung terciptanya kondisi sosial, hukum dan keamanan yang kondusif guna mendukung kelancaran pembangunan daerah serta untuk meningkatkan efektifitas penanganan konflik sosial secara terpadu, perlu disusun Rencana Aksi Daerah Penanganan Konflik Sosial Provinsi Lampung Tahun 2023;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya berjalan lancar, tertib dan terkoordinasi, perlu menyusun Rencana Aksi Daerah Penanganan Konflik Sosial Provinsi Lampung Tahun 2023 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah;
7. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 15 tahun 2018 tentang Upah Minimum;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023;

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 200.4.5/8274/Polpum tanggal 12 Desember 2022 perihal Pelaporan Data Dukung Rencana Aksi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Provinsi Periode target B.12 Tahun 2022 dan Penyampaian Draft Rencana Aksi Daerah Tahun 2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENANGANAN KONFLIK SOSIAL PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023.**
- KESATU : Menyusun Rencana Aksi Daerah Penanganan Konflik Sosial Provinsi Lampung Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Rencana Aksi Daerah, dengan kegiatan sebagai berikut:
- a. Pencegahan Konflik Sosial;
 - b. Penghentian/Penyelesaian Konflik Sosial dan Terorisme;
 - c. Pemulihan Pasca Konflik; dan
 - d. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Aksi Tahun 2023.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 15-3 - 2023

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan RI di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/207 /VI.07/HK/2023
 TANGGAL : 15 - 3 - 2023

**RENCANA AKSI DAERAH PENANGANAN KONFLIK SOSIAL TAHUN 2023
 PROVINSI LAMPUNG**

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B04, B08, B12	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
A. Pencegahan						
1. Konflik Sosial						
a. Penanaman Nilai-Nilai Ideologi Pancasila & Wawasan Kebangsaan						
Peningkatan Nilai-Nilai Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dalam pencegahan konflik sosial (RA: 01)	Bakes bangpol, Korem 043/ Garuda Hitam	Kanwil Kemenag, Disdikbud, Dispora, Polda,	Meningkatnya kesadaran akan pentingnya Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dalam pencegahan konflik sosial.	Target: Terlaksananya Peningkatan Nilai-Nilai Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dalam pencegahan konflik sosial sebanyak 3 Kali.	Target B04: Terlaksananya Peningkatan Nilai-Nilai Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dalam pencegahan konflik sosial sebanyak 1 Kali Target B08: Terlaksananya Peningkatan Nilai-Nilai Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dalam pencegahan konflik sosial sebanyak 1 Kali	Kegiatan dapat berupa: - Sosialisasi; - Dialog; - Lokakarya.

1	2	3	4	5	6	7
					Target B12: Terlaksananya Peningkatan Nilai-Nilai Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dalam pencegahan konflik sosial sebanyak 1 Kali	
Pembinaan Pondok Pesantren dan Organisasi Masyarakat Dalam Pencegahan Konflik Sosial (RA: 02)	Bakesbang pol, Kanwil Kemenag	Polda, Disdikbud, Korem 043/GATAM, Dispora	Meningkatnya Pengetahuan Pondok Pesantren dan Organisasi Masyarakat Dalam Pencegahan Konflik Sosial dan Pemantapan Wawasan Kebangsaan	Target: Terlaksananya Pembinaan Pondok Pesantren dan Organisasi Masyarakat Dalam Pencegahan Konflik Sosial sebanyak 3 kali	TARGET B04: Terlaksananya Pembinaan Pondok Pesantren dan Organisasi Masyarakat Dalam Pencegahan Konflik Sosial sebanyak 1 kali TARGET B08: Terlaksananya Pembinaan Pondok Pesantren dan Organisasi Masyarakat Dalam Pencegahan Konflik Sosial Sebanyak 1 kali TARGET B12: Terlaksananya Pembinaan Pondok Pesantren dan Organisasi Masyarakat Dalam Pencegahan Konflik Sosial Sebanyak 1 kali	Kegiatan dapat berupa: - Sosialisasi, atau - Dialog, atau - Bimtek.

1	2	3	4	5	6	7
Peningkatan kesadaran hukum masyarakat dalam rangka pencegahan konflik sosial (RA: 03)	Kejati, Biro Hukum, Kanwil KumHAM	Bakesbangpol, Kanwil BPN, Korem 043/GATAM, Binda	Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat dalam mencegah konflik sosial	Target: Terlaksananya penyuluhan hukum kepada masyarakat dalam mencegah konflik sosial sebanyak 3 kali	Target B04: Terlaksananya penyuluhan hukum kepada masyarakat dalam mencegah konflik sosial sebanyak 1 kali Target B08: Terlaksananya penyuluhan hukum kepada masyarakat dalam mencegah konflik sosial Sebanyak 1 kali Target B12: Terlaksananya penyuluhan hukum kepada masyarakat dalam mencegah konflik sosial sebanyak 1 kali	Kegiatan dapat berupa: - Sosialisasi, atau - Dialog, atau - Bimtek, - FGD.
Sosialisasi Pemilih Pemula Dalam Pemilu Serentak tahun 2024 (RA : 04)	Kesbangpol, KPU	Dinas Pendidikan, Dispora, Bawaslu	Meningkatnya Pengetahuan Pelajar/mahasiswa tentang kewajiban Partisipasi Pemilu	Target : Terlaksananya sosialisasi Pemilih Pemula pada Pemilu serentak dan Pilkada tahun 2024 sebanyak 3 kali	Target B04: Terlaksananya sosialisasi Pemilih Pemula pada Pemilu serentak dan Pilkada tahun 2024 sebanyak 1 kali Target B08: Terlaksananya sosialisasi Pemilih Pemula pada Pemilu serentak dan Pilkada tahun 2024 sebanyak 1 kali	Kegiatan dapat berupa: - Sosialisasi, atau - Dialog,

1	2	3	4	5	6	7
					Target B12: Terlaksananya sosialisasi Pemilihan Pemula pada Pemilu serentak dan Pilkada tahun 2024 sebanyak 1 kali	
Pelaporan dan penyusunan peta kerawanan konflik menjelang Pemilu Serentak Tahun 2024 (RA : 05)	Kesbangpol POLDA BINDA	Tim Terpadu Tingkat Provinsi, Tim Terpadu Tingkat Kab/Kota	Terciptanya situasi kondusif diwilayah menjelang pelaksanaan Pemilu serentak tahun 2024	Target: Terlaksananya pelaporan data perkiraan situasi daerah, menjelang Pemilu serentak tahun 2024 setiap bulan sebanyak 3 kali	Target B04 Terlaksananya pelaporan data perkiraan situasi daerah dan kerawanan menjelang Pemilu serentak tahun 2024 di bulan Januari, Februari, Maret , April 2023. Target B08: Terlaksananya pelaporan data perkiraan situasi daerah dan kerawanan menjelang Pemilu serentak tahun 2024 di bulan Mei, Juni, Juli, Agustus 2023 Target B12: Tersusunnya peta kerawanan menjelang Pemilu tahun 2024 dibulan Januari-Desember 2023	

1	2	3	4	5	6	7
Mediasi dan Fasilitasi, monitoring dan evaluasi penyelesaian konflik berlatar belakang lahan/sda, sara, politik dan batas daerah administrasi, ekonomi/ industrial tahun 2023 di Provinsi Lampung (RA: 06)	Disnakertrans, Dinas Kehutanan, Polda	Biro Hukum Disbun, Dinsos, Kanwil BPN, Kanwil agama	Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Konflik Berlatar Belakang Lahan/SDA, SARA, Politik dan Batas Daerah Administrasi, Ekonomi/Industrial di Kab/Kota	TARGET: Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Konflik berlatar belakang Lahan/SDA, Sara, Politik dan Batas Daerah Administrasi, Ekonomi/Industrial yang terjadi di Tahun 2023	TARGET B04: Fasilitasi Penyelesaian kasus konflik berlatar Belakang Lahan/SDA, Sara, Politik dan Batas Daerah Administrasi, Ekonomi/ Industrial, yang terjadi pada bulan Januari-April 2023 TARGET B08: Fasilitasi Penyelesaian kasus konflik berlatar Belakang Lahan/SDA, Sara, Politik dan Batas Daerah Administrasi, Ekonomi/Industrial, yang terjadi pada bulan Mei-Agustus 2023 TARGET B12: Fasilitasi Penyelesaian kasus konflik berlatar Belakang Lahan/SDA, Sara, Politik dan Batas Daerah Administrasi, Ekonomi/Industrial, yang terjadi pada bulan September-Desember 2023	
Fasilitasi Pemberian bantuan kepada masyarakat yang terdampak konflik sosial (RA: 07)	Dinas Sosial, BPBD	Tim Terpadu Tingkat Provinsi, Tim Terpadu Tingkat Kab/Kota	Terlaksananya kegiatan Fasilitasi Pemberian bantuan kepada masyarakat yang terdampak konflik sosial	Target: Terlaksananya kegiatan Fasilitasi Pemberian bantuan kepada masyarakat yang terdampak konflik sosial sebanyak 3 kali	Target B04 Terlaksananya kegiatan Fasilitasi Pemberian bantuan kepada masyarakat yang terdampak konflik sosial sebanyak 1 kali	

1	2	3	4	5	6	7
					Target B08: Terlaksananya kegiatan Fasilitasi Pemberian bantuan kepada masyarakat yang terdampak konflik sosial sebanyak 1 kali Target B12: Terlaksananya kegiatan Fasilitasi Pemberian bantuan kepada masyarakat yang terdampak konflik sosial sebanyak 1 kali	

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI